EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI 3 KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Oleh:
GENOVEVA JESICA FRAMITA
NIM. E42012032

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Tahun 2016

E-mail : jesicaframita@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 3 Sintang Kabupaten Sintang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pelaksanaan program BOS yang belum optimal sehingga masih terdapat permasalahan, yaitu alokasi dana BOS yang belum tepat sasaran, penggunaan dana BOS yang belum sesuai dengan juknis dan kurangnya komunikasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan program BOS belum berhasil, hal tersebut dilihat dari sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengelola dana BOS, komunikasi antar organisasi yang kurang intens, dan kurangnya kerjasama antar pengurus program BOS berjalan tidak lancar. Sikap para pelaksana belum memiliki pandangan yang sama dalam usaha untuk mensukseskan pelaksanaan program dan tidak bekerja sama dengan baik, sehingga timbul permasalahan pada saat mengimplementasikan program.

Kata-kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Program BOS.

EVALUATION IMPLEMENTATION OF BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) ON SMP NEGERI 3 SINTANG SUB DISTRICT SINTANG REGENCY

Abstract

Thesis is intended to indtify and describe the evaluation implementation of the Bantuan Operasional Sekolah (BOS) on SMP Negeri 3 Sintang sub Distrct Sintang regency. The title of this thesis appointed based BOS program implementation issues that have not been optimized so that there are problems, namely the allocation of BOS funds that have not been targeted, use of the funds are not in accordance with guiedlines and a lack of communication betwen the school and the Department of Education. The result showed the evaluation implementation of the BOS program has not been successful,it is seen from the human resources are adequate to manage BOS funds, communication between organizations that are less intense, and the lack of cooperation among administrators BOS program run is not smooth. As well as the attitude of the implementers do not have the same view together, so that problems arise during the implementation program.

Keywords : Evaluation, Implementation, BOS.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan nasional. Pemerintah harus mempunyai program yang tepat dalam menangani masalah pendidikan nasional melalui suatu kebijakan politik yang harus direalisasikan bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang lain. Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara Indonesiasalah satunya diwujudkan melalui program yang telah dibuat, yaitu program Bantuan Opersional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Program BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara *online*. Dimana dana BOS yang diberikan akan terus meningkat untuk setiap tahun anggarannya.

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam perceptan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh Karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Program BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara *online*. Dimana dana BOS yang diberikan akan terus meningkat untuk setiap tahun anggarannya.

Peran kepala sekolah dalam manajemen BOS menjadi penting terutama dalam perancangan dan implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pada SMP Negeri 3 Sintang, progam BOS dialokasikan untuk siswa tidak mampu. Namun seiring dengan perubahan peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dana BOS diperuntukan

GENOVEVA JESICA FRAMITA, NIM. E42012032
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

untuk semua siswa tanpa terkecuali. Jumlah siswa di SMP Negeri 3 untuk tahun anggaran 2015/2016 berjumlah 427 orang. Berarti dana yang nantinya akan dialokasikan berjumlah Rp 427.000.000,00 yang dibagi kedalam 4 triwulan. Untuk penggunaan dana tersebut, pihak SMP Negeri 3 Sintang menyususn rencana penggunaan dana yang disusun ke dalam RKAS.

Juknis BOS menjelaskan bawa penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan), Tim Manajemen BOS Sekolah dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat. Kesepakan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan. Dana BOS yang telah disalurkan kepada sekolah nantinya akan dikelola oleh sekolah sesuai dengan komponen pembiayaan yang tertera di dalam petunjuk teknis (Juknis) BOS.

Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, terdapat beberapa indikasi tentang realisasi penggunaan dana BOS yang belum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) BOS. Data hasil olahan penulis menunjukkan bahwa, dalam laporan penggunaan Dana BOS pada poin ke 5 (lima) yaitu pengembangan sarana dan prasarana sekolah tertera jumlah penggunaan dana tersebut. Namun, dilihat dari infrastruktur sekolah pada SMP Negeri 3 Sintang masih terdapat beberapa fasilitas sekolah yang rusak. Dimana fasilitas tersebut belum dilakukan perbaikan ataupun penambahan fasilitas yang masih kurang.

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari pengelola BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 3 Sintang masih sering terlambat dalam menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) per triwulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudyaaan. Dalam pelaporan penggunaan dana BOS sudah ditentukan waktu pengumpulan LPJ yang tertera di dalam Juknis. Kurangnya pemahaman dari sumber daya manusia dalam hal ini implementor yang belum memahami tata cara kelola penggunaan dana BOS. Apabila pihak sekolah terlambat menyerahkan LPJ,

GENOVEVA JESICA FRAMITA, NIM. E42012032
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

nantinya dalam pencairan dana untuk triwulan berikutnya akan mengalami hambatan. Akibatnya program/kegiatan yang telah dirancang dalam RKAS akan terlambat pelaksanaannya.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 3 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yaitu:

1. Penggunaan dana BOS yang belum sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis).
2. Pemahaman sumber daya yang kurang dalam mengelola dana BOS.
3. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis kemukakan, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu, "Mengapa pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 3 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang belum berhasil?".

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelaksanaan program BOS pada SMP Negeri 3 Kecamatan Sintang Kabuaten Sintang melalui enam faktor yakni: faktor standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait; sikap para pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini, selain itu untuk menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontibusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan pada umumnya dan untuk bidang evaluasi program dan juga sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan menjadi pedoman pemecahan masalah mengenai evaluasi

pelaksanaan program BOS yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan untuk SMP Negeri 3 Sintnag dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS agar sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Salah satunya adalah menciptakan pendidikan nasional berkualitas yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagai pelaksana kegiatan pendidikan nasional. Sekalipun tindakan kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan tersebut dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan.

Selanjutnya menurut Dye (dalam Subarsono, 2005: 2) menyebutkan kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna bahwa:

a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilkukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik, selanjutnya Suharto (2013: 8) menjelaskan bahwa kebijakan publik mencakup:

a. Tujuan. Kebijakan publik senantiasa menyangkut pencapaian tujuan pemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik.
b. Keputusan. Pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian konsekuesi-konsekuensinya.
c. Tindakan. Tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan pemilihan program-program prioritas lembaga eksekutif.

Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik

GENOVEVA JESICA FRAMITA, NIM. E42012032
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kebang di masyarakat. Jadi, tidak semua masalah publik tadi bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik (*only those that move to action become policy problems*). Oleh karena itu, merumuskan masalah kebijakan publik merupakan tahapan yang esensial dalam proses kebijakan publik.

c. Implementasi Kebijakan

Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahapan implementasi. Tahapan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2011: 149) mengemukakan bahwa: "Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya".

Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa, 1994: 19) memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja tinggi yang berlangsung dalam antarhubungan berbagai faktor sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran kebijakan. Karena dijadikan sebagai kitreria penialaian, maka standard dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan kongkret. Untuk menangkap tujuan spesifik yang diingini oleh suatu kebijakan, maka evaluator perlu mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakannya itu. Apa yang

sebenarnya ingin dicapai oleh suatu kebijakan.

2. Sumber Daya

   Kebijakan menuntut tersediana sumber daya, baik yang berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai. Dalam hal ini evaluator dapat menguji efisiensi dari implementasi kebijakan yang dikajinya.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

   Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan. Ini menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan. Organisasi atasan (superior) mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana untuk memiliki idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan.

4. Komunikasi antar Organisasi Terkait

   Organisasi pelaksana memiliki enam variable, yang semuanya harus dicermati oleh seorang evaluator, yaitu: (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang dan derajat pengendalian, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi dan (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

   Sebagamana dapat diambil inferensi logis, kondisi sosial, ekonomi dan oolitik juga berpengaru terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Ini merupakan implikasi dari perpektif sistemik.

6. Sikap para pelaksana

   Kognisi, netralitas dan obyektivitas para individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi tidak akan efektif. Hal yang sama juga akan terjadi bila “loyalitas” pelaksana kepada organisasi rendah.

d. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan criteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hari-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalanya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Selajutnya, Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Mustofadijaja (dalam Widodo, 2010: 111) menyatakan evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atau sesuatu "fenomena" di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu.

Evaluasi kebijakan tidak hanya untuk melihat hasil atau dampak, akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Jadi, evaluasi dapat digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan menurut Weiss (dalam Widodo, 2010: 114) mengandung beberapa unsur penting.

1. Untuk mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
2. Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.

3. Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan criteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.
4. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan social (*the social purpose*) dari evaluasi.

Tanpa evaluasi, kita tidak dapat mengetahui bagaimana hasil yang dicapai dari sebuah program yang telah dibuat. Evaluasi merupakan tahap dimana suatu program dapat diketahui apakah telah berhasil atau selaras dengan tujuan program yang sebenarnya. Dengan evaluasi juga menghasilkan *feedback* (umpan-balik) yang nantinya akan menjadi acuan bagi para perencana program kedepannya untuk menyusun program baru ataupun untuk meneruskan program yang ada, sehingga jika nantinya ada kecenderungan yang mengarah pada kegagalan dapat diminimalisir.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga membuat tidak mungkin data sosial tersebut dijaring dengan metode kuantitatif. Dalam hal ini jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan bagaimana evaluasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 3 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

C. PEMBAHASAN

1. *Standar dan Sasaran Kebijakan*

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan penulis bahwa untuk faktor standar dan sasaran dalam pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 3 Sintang tidak ditemui masalah dalam pelaksanaannya. Dari pihak sekolah dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menentukan standar dan sasaran dan hal tersebut sudah dipadukan sesuai dengan acuan yang digunakan selama program ini berjalan, yaitu Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang selalu diperbaharui setiap tahunnya. Namun dalam realisasinya

GENOVEVA JESICA FRAMITA, NIM. E42012032
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

masih belum sesuai dengan program sekolah yang dapat dilihat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

2. *Sumber Daya*

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di SMP Negeri 3 Sintang, penulis melihat bahwa ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan program BOS ini masih menjadi kendala, baik itu dari segi kualitas manusianya. Menurut pernyataan dari informan yang membahas indikator sumber daya, menyatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dana BOS walaupun program BOS di SMP Negeri 3 tetap berjalan namun jika melihat lagi dari implementor yang mengelola penggunaan dana BOS di SMP Negeri 3 Sintang karena dari fenomena yang penulis lihat waktu penelitian di lapangan dan juga selama melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bahwa sumber daya manusia yang masih kurang memadai dalam pengelolaan dana BOS

3. *Karakteristik Organisasi*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di SMP Negeri 3 Sintang, masih terdapat kekurangan mengenai struktur oraganisasi sekolah. Pihak sekolah tidak memiliki struktur organisasi sekolah, padahal struktur organisasi tersebut sangat penting dalam menetapkan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian supaya setiap pegawai bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada saat penulis menanyakan tentang struktur organisasi sekolah, pihak sekolah kebingungan menjawab apakah ada atau tidak struktur organisasi. Dan pada akhirnya mereka mengakui bahwa tidak mempunyai sktuktur organisasi.

4. *Komunikasi antar Organisasi*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan, dapat diketahui bahwa belum adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan. Seharusnya informasi yang diberikan harus diketahui oleh setiap aspek yang bersangkutan. Namun masih ada pihak yang merasa belum jelas dengan informasi yang disampaikan, berarti kejelasan informasi yang telah diberikan masih kurang mendetail. Bisa-bisa nanti menimbulkan pertanyaan, dana yang ada dipakai untuk apa saja. Jangan-jangan diselewengkan oleh implementor tersebut.

5. *Sikap Para Pelaksana*

Pihak yang ditunjuk sebagai Tim Manajemen BOS sudah diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan

program sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang. Dimana tugas tersebut diperkuat dengan SK penugasan sebagai bendahara BOS. Pada faktor sikap para pelaksana, pihak sekolah sudah berusaha memahami program BOS di SMP Negeri 3 Sintang dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diberikan.

6. *Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik*

Berdasarkan hasil wawancaran yang penulis lakukan, dapat dilihat bahwa dari faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang berasal dari golongan sosial ekonomi menengah kebawah sangat mendukung dengan adanya program BOS yang membantu meringankan beban orang tua murid dalam membiayai pendidikan anak mereka. Dan elite politik juga mendukung dan membantu sekolah dengan diberikannya BOSDa (BOS Daerah) yang dialokasikan dari dana APBD.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada BAB V tentang hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengruhi mengapa pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 3 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang berhasil, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan. Pelaksanaan program BOS pada SMP Negeri 3 Sintang dalam menentukan standar dan sasaran kebijakan walaupun sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan program BOS, namun dalam realisasi penggunaan dana tersebut belum sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh pihak sekolah.
2. Sumber Daya. Faktor sumber daya dalam pelaksaanaan program BOS ditemui beberapa masalah dalam implementasi program BOS pada SMP Negeri 3 Sintang diantaranya adalah sumber daya manusia yang belum memadai, dimana kurangnya pemahaman implementor dengan tata cara kelola penggunaan dana BOS. Kurangnya pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah yang seharusnya intensitas pelatihan tersebut harus lebih sering pelaksanaannya agar implementor memahami dengan baik tata cara kelola penggunaan dana BOS. Selain itu fasilitas sekolah yang kurang

memadai dimana masih terdapat fasilitas yang masih rusak membuat kenyamanan dan belajar siswa menjadi kurang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Padahal dalam RKAS telah dipaparkan penggunaan dana BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana. suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur biroktasi. Struktur birokrasi di Sekolah maupun di Dinas sudah membantu dan mempermudah dalam pemberian tugas untuk pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 3 Sintang. Dalam hal ini dari pihak sekolah dan Dinas sudah membentuk Tim Manajemen BOS yang dibuat untuk melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing implementor.
4. Komunikasi anatar Organisasi Pelaksana. Dalam pelaksanaan program BOS faktor yang berpengaruh selanjutnya adalah komunikasi antar organisasi, dimana komunikasi antar organsisasi pelaksana dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu program. Hal ini dirasakan masih kurang karena dari pihak sekolah masih terdapat perbedaan pendapat dalam hal kurang terbukanya implementor dalam penggunaan dana BOS, yang seharusnya RKAS itu diketahui oleh setiap pihak yang terlibat dalam penggunaan dana BOS. Jika masih ada pihak yang merasa belum jelas dengan informasi yang disampaikan, berarti kejelasan informasi yang telah diberikan masih kurang mendetail.
5. Sikap Para Pelaksana. Pada faktor sikap para pelaksana program BOS mengenai pemahaman, respon kebijakan dan tindakan pelaksanaan dirasakan sudah baik karena implementor berusaha semaksiamal mungkin untuk terus meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program BOS walaupun masih terdapat beberapa kendalam dalam sumber daya yang masih belum memadai dalam setiap organisasi pelaksana program.
6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Pada faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar berasal dari golongan sosial ekonomi menengah ke bawah sangat mendukung adanya program BOS, dimana program ini sangat membantu mereka dalam meringankan beban pembiayaan sekolah anak mereka. Dan untuk elite politik sudah membantu

dengan diberikannya dana BOSda yang dianggarkan dari dana APBD untuk pembiayaan pendidikan.

.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa masukkan atau saran kepada pihak SMP Negeri 3 Sintang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang agar dapat mencapai keberhasilan dala pelaksanaan program. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan:

1. Dalam pelaksanaan program BOS agar komunikasi terjalin tepat sasaran dan terciptanya komunikasi dua arah yang baik, maka pihak sekolah harus bersikap terbuka kepada dewan guru, komite sekolah dan juga orang tua siswa mengenai penggunaan dana BOS yang dikeluarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan dana.
2. Untuk staf yang dipilih untuk mengelola dana BOS, harus diberikan pembinaan dan pelatihan yang cukup agar dapat memahami dengan baik penggunaan dana BOS dan tata cara kekola anggaran.
3. Untuk koordinasi antara organisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar kedepannya memberikan sosialisasi yang lebih mendetail lagi mengenai ketentuan-ketentuan dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 3 Sintang agar pihak sekolah dapat memahami dengan baik dengan peraturan BOS dan tidak mengambil keputusan sendiri dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan.
4. Perlunya kesamaan pandangan yang sama dari pelaksana program agar terciptanya tujuan yang berdampak positif bagi sekolah dan pelaksanaan program ke depan menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya.
5. Perlu adanya pengawasan melekat dari pembuat kebijakan agar dalam pelaksaan program BOS di SMP Negeri 3 Sintang dapat berjalan dengan baik.
6. Pelaksanaan program BOS diharapkan kedepannya untuk terus diperpanjang dan juga perlu adanya peraturan baru mengenai sanksi bagi mereka yang melanggar ketetapan penggunaan dana BOS.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 3 Sintang, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan

dalam memaparkan fenomena yang ada di lapangan, mengingat penulis sendiri masih baru dalam melakukan penelitian ilmiah ini. Adapun keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Beberapa informan yang sulit untuk ditemui karena ada kesibukan pribadi yang tidak bisa diganggu.
2. Kurang terbukanya informan dalam memberikan informasi secara maksimal terkait dengan masalah yang penulis teliti sehingga sangat menghambat penulis dalam mendapatkan data.
3. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian juga menjadi salah satu kurang maksimalnya proses pengumpulan data di lapangan.

G. REFERENSI

1. Buku-Buku

Agustinus, Leo. 2006. ***Dasar-Dasar Kebijakan Publik***. Bandung: Alfabeta.

Dunn, Willian. N. 2003. ***Analisis Kebijakan Publik***. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Islamy, M. Irfan. 2007. ***Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik***. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Moleong, Lexy. 2013. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Subarsono, AG. 2005. ***Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)***. Bandung: Alfabeta.

----------. 2013. ***Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi***. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2013. ***Kebijakan Sosial Sebaga Kebijakan Publik***. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. ***Implementasi Kebijakan Publik***. Bandung: AIPI & Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Wahab , Solochin Abdul. 1991. ***Pengantar Kebijakan Negara***. Jakarta: Rhimena Cipta.

Wibawa, Samodra. 1994. ***Evaluasi Kebijakan Publik***. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Widodo, Joko. 2010. ***Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik***. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2011. ***Kebijakan Publik: Teori, Proses & Studi Kaus.*** Yogyakarta: CAPS.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

161 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015.

3. Skripsi

Robertus, S. F. 2012. *Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 1 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.*

Krisno, Wibowo. 2013. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis dan Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.*

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: Genoveva Jesica Framita
NIM / Periode Lulus	: E42012032 / 2016
Fakultas / Jurusan	: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP	: jesicaframita@yahoo.co.id / 081348855419

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERAIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI 3 KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☑ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Desember 2016

(Genoveva Jesica Framita)